



(RENJA PD)

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2026

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI RIAU





SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2025

Plt. GUBERNUR RIAU,

TTD

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat, dan KaruniaNya penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Renja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Pembangunan pada sektor Transportasi di Tahun 2026 masih dihadapkan pada peningkatan keselamatan, peningkatan kelancaran mobilitas serta masalah aksesibilitas pelayanan terutama pada pelayanan jasa transportasi di wilayah terpencil dan terluar, yang belum seluruhnya dapat dijangkau secara memadai. Selain itu masalah investasi prasarana dan sarana transportasi, masih memerlukan subsidi operasi dan dukungan investasi pemerintah yang cukup besar dalam upaya menyelenggarakan pelayanan transportasi yang murah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Dengan adanya Dokumen Renja Tahun 2026 ini, maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Riau mempunyai Pedoman Kerja dalam mewujudkan Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Riau untuk urusan perhubungan.

Akhir kata Saya atas nama seluruh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian Dokumen Renja Tahun 2026 ini. Semoga Dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau.

Pekanbaru, Oktober 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI RIAU**



ANDI YANTO, SH, MH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19740728 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja 2026	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU	11
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Riau.....	11
2.1.1 Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah	11
2.1.2 Struktur Organisasi PD	11
2.1.3 Uraian Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi PD (Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 53 Tahun 2023)	15
2.1.4 Personil Dan Tata Laksana Dinas Perhubungan Provinsi Riau.....	18
2.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	20
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis.....	34
2.3.1 Permasalahan	34
2.3.2 Isu Strategis.....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	35
3.1 Tujuan Dan Sasaran Tahun 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Riau.....	35
3.1.1 Tujuan.....	35
3.1.2 Sasaran.....	35
BAB IV PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA URUSAN.....	37
4.1 Rencana Program	37
4.2 Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Bidang Urusan Perhubungan.....	79
BAB V PENUTUP	80

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian	80
5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Golongan	18
Tabel 2.2 ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Jabatan	18
Tabel 2.3 ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Tabel 2.4 ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan.....	19
Tabel 2.5 ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024....	21
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024....	22
Tabel 2.8 Isu Permasalahan	34
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Target Kinerja Pemerintah Daerah 2026	35
Tabel 4.1 PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	38
Tabel 4.2 PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN	59
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Renja Perangkat Daerah 2026	79
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Renja Perangkat Daerah 2026.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Gambaran keterkaitan dokumen-dokumen perencanaan dan Penganggaran.	5
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Riau.....	13
Gambar 2.2	Bagan Organisasi UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I.....	14
Gambar 2.3	Bagan Organisasi UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Riau Tahun 2026 Dinas Perhubungan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan provinsi riau tahun 2026 dimana urusan sektor perhubungan termasuk pada misi ke tiga yaitu **“Memperkuat infrastruktur yang handal, guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah”**. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur melalui peningkatan pelayanan transportasi. Pada tahun 2026, **Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026 adalah “Perkuatan Fondasi Tranformasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah Dan Ekonomi Inklusif Yang Berkelanjutan”**.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam periode jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dinas Perhubungan Provinsi Riau bahagian dari amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berpartisipasi pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 berprioritas pada Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, dan Transformasi Infrastruktur. Dinas perhubungan pada RKPD tahun 2026 terfokus pada prioritas Transformasi Infrastruktur yang berisikan peningkatan infrastruktur (infrastruktur dasar, kawasan ekonomi, kawasan strategis provinsi, kawasan industri). Tema ini berisi dua sasaran, urusan tranposrtasi bagian dari sasaran yang pertama, yaitu:

“Meningkatnya Konektivitas Daerah , Dengan Indikator kinerja Dari Sasaran Tersebut Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi”.

Maka Perencanaan Pembangunan Daerah harus dilakukan sebelum anggaran dan kegiatan untuk tahun yang akan datang berjalan, yaitu melakukan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya,

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kesempatan pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah dan urusan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk kepentingan masyarakat berdasarkan potensi daerahnya. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang Perencanaan Jangka Panjang. Perencanaan Jangka Menengah maupun Perencanaan Tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPN).

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Secara hierarki penyusunan rencana kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pengertian Renja SKPD adalah :

1. Dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Renja OPD tahun 2026 merupakan penjabaran Renstra OPD yang mengacu pada RKPD pada tahun anggaran 2026.
3. Renja OPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran.
4. Renja OPD menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai tupoksinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Dinas Perhubungan Provinsi Riau sebagai instansi teknis dengan tipe A di lingkungan pemerintah Provinsi Riau bertanggungjawab kepada Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada sektor perhubungan.

Sejalan dengan dasar pikir diatas maka Dinas Perhubungan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk Tahun 2026. Dimana Rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses, meliputi:

1. Tahapan Perumusan rancangan Renja OPD Perumusan rancangan Renja OPD, dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengolahan data dan informasi;
 - b. Analisis gambaran pelayanan OPD;
 - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;

- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
- e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- f. Perumusan tujuan dan sasaran;
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- h. Perumusan kegiatan prioritas;
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- j. Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
- k. Pembahasan forum OPD;
- l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD

Dalam hal penyajian, sistematika penulisan dokumen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017.

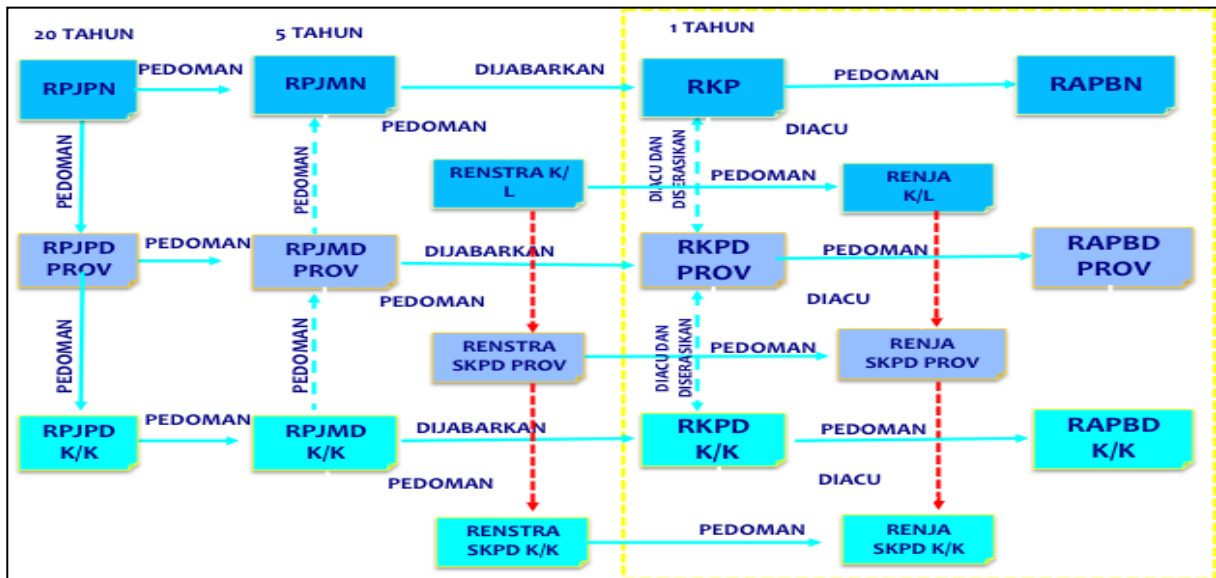
Pagu akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Provinsi Riau Tahun 2026 Dinas Perhubungan sebesar Rp 46.813.552.173,00 (Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan hasil penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Riau sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang memuat prioritas program dan kegiatan pada tahun anggaran 2026, serta berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) PD akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Sedangkan keterkaitan Rencana Kerja (Renja) PD dengan Rencana Kerja (Renja) K/L dan Rencana Kerja (Renja) Kab/Kota dimaksudkan agar menjadi masukan dalam melakukan perumusan tujuan sasaran berdasarkan tupoksi Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar antara program kegiatan dan target yang ada pada dokumen Rencana Kerja (Renja) K/L menjadi acuan dan pedoman pada dokumen Rencana Kerja (Renja) PD didalam penyusunan program kegiatan. Juga ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kab/Kota terhadap sasaran Rencana Kerja (Renja)

K/L dan Rencana Kerja (Renja) PD sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.



Gambar 1.1

Gambaran keterkaitan dokumen-dokumen perencanaan dan Penganggaran.

1.2 Dasar Hukum

Pembuatan Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan mengacu pada ketentuan pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017. Regulasi-regulasi yang menjadi acuan yaitu :

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026 1 - 47. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau

Tahun 2024 Nomor 14)

33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja 2026

Maksud Penyusunan Renja ini adalah untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dalam mencapai prioritas pembangunan sarana dan prasarana transportasi tahun 2026.

Tujuan penyusunan Rancangan Renja Tahun 2026 adalah untuk memastikan bahwa Dokumen tersebut sebagai bahan penyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (OD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 1.2Dasar Hukum
- 1.3 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMABARAN PELAYANAN PERMSALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

- 2.1 Tugas dan fungsi perangkat daerah
 - 2.1.1 Sumberdaya perangkat daerah
 - 2.1.2 Kinerja perangkat daerah capaian renja 2024 dan evaluasi
 - 2.1.3 Kelompok sasaran
- 2.2 Permasalahan pelayanan perangkat daerah
 - 2.2.1 Isu isu strategis

2.3

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Sasaran renja perangkat daerah 2026
- 3.3 Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan
- 3.4 Arah kebijakan

BAB IV. PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

- 4.1 Uraian program
- 4.2 Uraian kegiatan
- 4.3 Uraian sub kegiatan serta kinerja, indikator target dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pendukung prioritas
- 4.5 Target keberhasilan IKU
- 4.6 Target kinerja melalui indikator IKK

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Riau

2.1.1 Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Perhubungan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka acuan di dalam penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan harus menyesuaikan dengan kewenangan/pembagian urusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagai akibat dari pemberlakuan undang-undang tersebut, maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap tugas-tugas atau urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Dinas Perhubungan Provinsi Riau memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

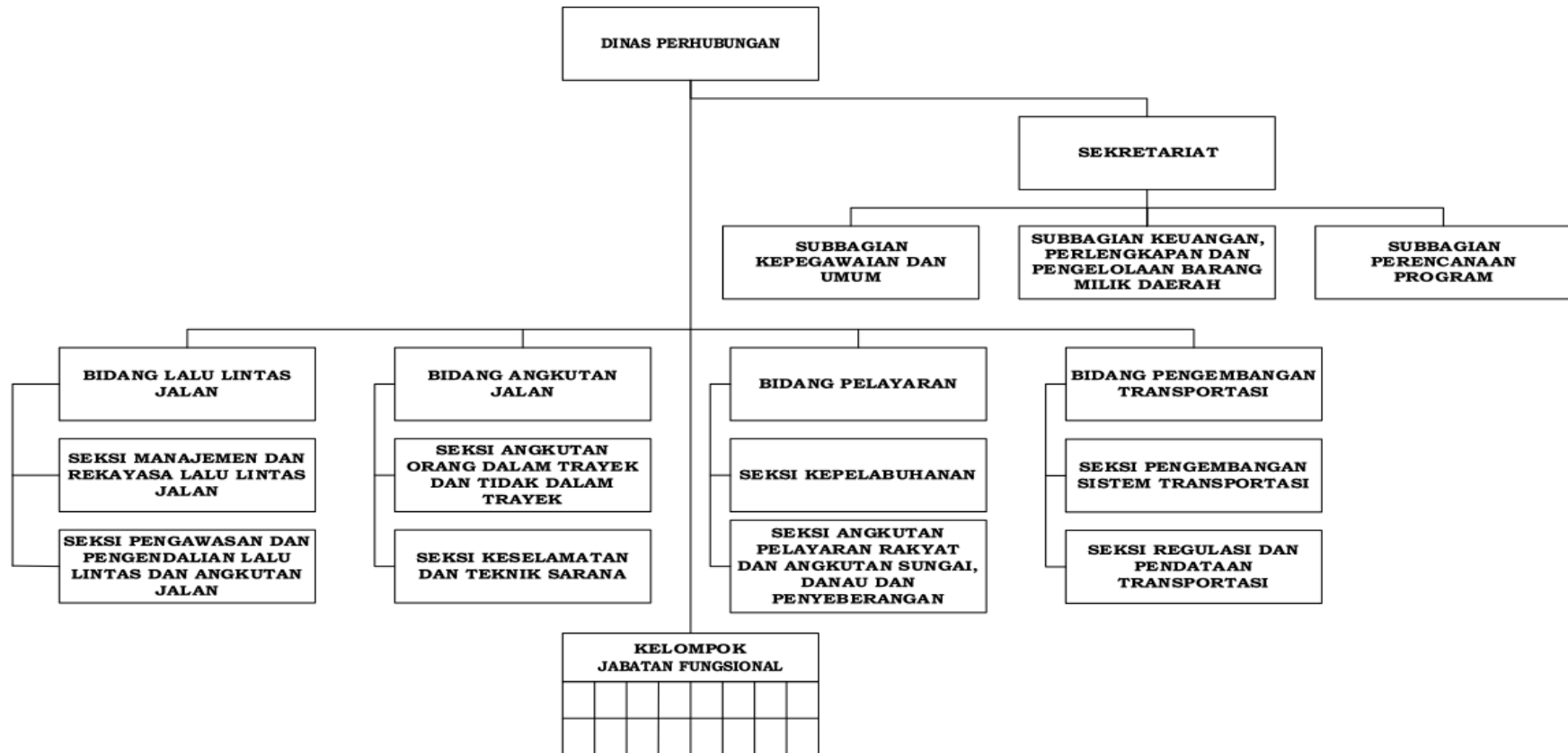
2.1.2 Struktur Organisasi PD

Susunan organisasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan Program.
 - b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

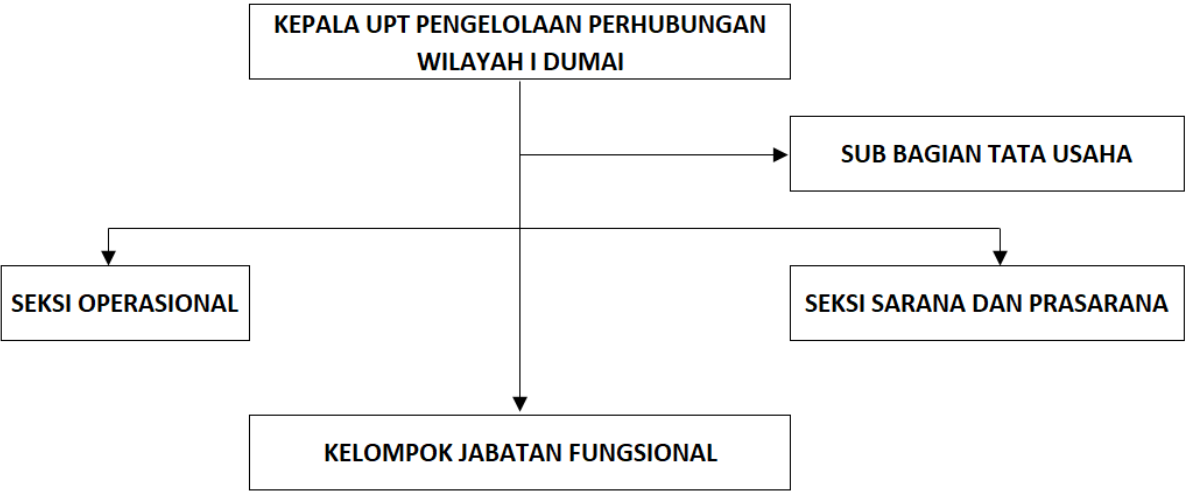
- c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- 3. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari:
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan.
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4. Bidang Angkutan Jalan, terdiri dari:
 - a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek.
 - b. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
- 5. Bidang Pelayaran, terdiri dari:
 - a. Seksi Kepelabuhan.
 - b. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- 6. Bidang Pengembangan Transportasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Sistem Transportasi.
 - b. Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Perhubungan.

Struktur Organisasi selengkapnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

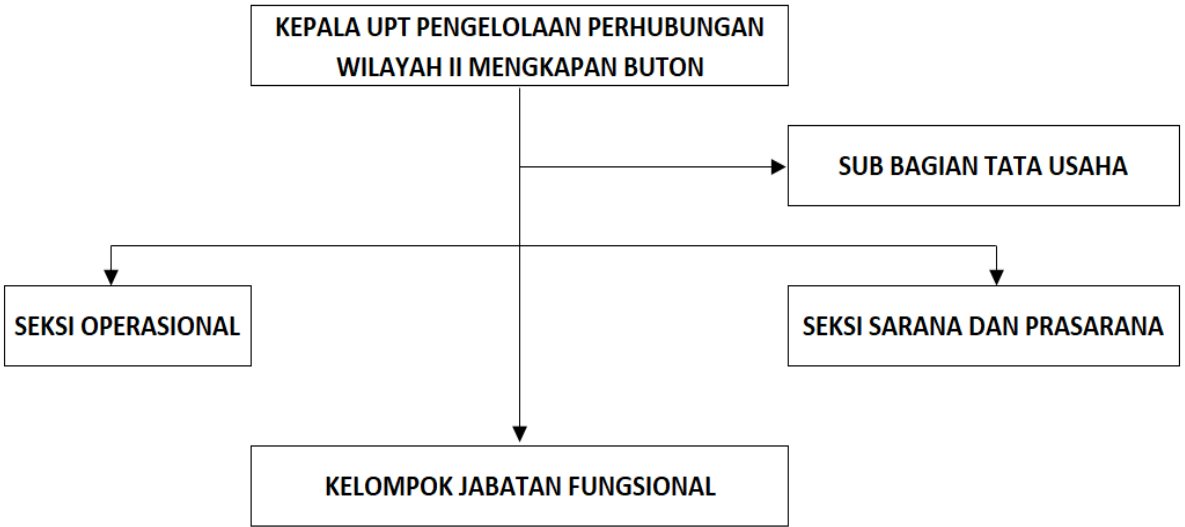


Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Riau



Gambar 2.2
Bagan Organisasi UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I



Gambar 2.3
Bagan Organisasi UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II

2.1.3 Uraian Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi PD (Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 53 Tahun 2023)

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi;
 - 4) Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi;
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait Perencanaan Program, Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepegawaian dan Umum.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretarias menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Perhubungan;
 - 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
 - 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
 - 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

- a. Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Prasarana Lalu Lintas Jalan, Pegawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Lalu Lintas Jalan;
 - 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Lalu Lintas Jalan;
 - 3) Pelaksanaan, kebijakan, kegiatan prasarana Lalu Lintas Jalan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Pegawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan bidang lalu lintas jalan dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
 - 5) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Lalu Lintas Jalan;
 - 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Kepala Bidang Angkutan Jalan

- a. Bidang Angkutan Jalan menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak dalam Trayek, Keselamatan dan Teknik Sarana, dan Angkutan Perkotaan Terintegrasi dan Pemandu Moda.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Angkutan Jalan;
 - 2) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Angkutan Jalan;
 - 3) pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan jalan, antara lain meliputi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak dalam Trayek, Keselamatan dan Teknik Sarana, dan Angkutan Perkotaan Terintegrasi dan Pemandu Moda;
 - 4) pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan bidang angkutan jalan dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
 - 5) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Angkutan Jalan;

- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;
- c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Angkutan Jalan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Kepala Bidang Pelayaran

- a. Bidang Pelayaran menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayaran menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang pelayaran;
 - 2) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang pelayaran;
 - 3) pelaksanaan kebijakan di bidang pelayaran, antara lain meliputi Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - 4) pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan bidang pelayaran dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
 - 5) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pelayaran;
 - 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayaran dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Kepala Bidang Pengembangan Transportasi

- a. Bidang Pengembangan Transportasi menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Pengembangan Sistem Transportasi, Pengkajian Sistem Transportasi, dan Regulasi dan Pendataan Transportasi.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Transportasi menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Pengembangan Transportasi;
 - 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Pengembangan Transportasi;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan bidang pengembangan transportasi dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;

- 4) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan transportasi, antara lain meliputi pengembangan sistem transportasi, pengkajian sistem transportasi, dan regulasi dan pendataan transportasi;
 - 5) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pengembangan Transportasi;
 - 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Transportasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.4 Personil Dan Tata Laksana Dinas Perhubungan Provinsi Riau

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Golongan

Berdasarkan data pada Tabel 2.1 diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Provinsi Riau didominasi oleh Golongan III yang berjumlah 80 (delapan puluh) orang atau 64,52% dari jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Sedangkan jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Provinsi Riau golongan I tidak ada.

Tabel 2.1
ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN RUANG GAJI	JUMLAH	%
1	Gol. IV	15	12,1
2	Gol. III	80	64,52
3	Gol. II	29	23,39
4	Gol. I	0	0
JUMLAH		124	100

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025

2. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Jabatan

Berdasarkan jabatan ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok sebagaimana data pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau
Berdasarkan Tingkat Jabatan

NO.	JABATAN/ESSELON	JUMLAH	%
1	Eselon II	1	0,81
2	Eselon III	7	5,65
3	Eselon IV	17	13,71
4	Fungsional	6	4,84

5	Staf /Non Struktural	93	75
---	----------------------	----	----

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025

3. **Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal**

Tabel 2.3
ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Sarjana Strata III (S.3)	0	0,00
2	Sarjana Strata II (S.2)	24	19,35
3	Sarjana Strata I (S.1)	59	47,58
4	Diploma	16	12,90
5	SMA	25	20,16
6	SMP	0	0,00
7	SD	0	0,00
JUMLAH		124	100

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025

Berdasarkan jabatan ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau terbagi menjadi 7 (Tujuh) kelompok sebagaimana data pada Tabel 2.3 di atas.

4. **Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan**

Data pada Tabel 2.4 berikut menggambarkan bahwa ASN di Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan berjumlah 23 (Dua Puluh tiga) orang. Pendidikan penjenjangan dengan jumlah terbanyak adalah Diklatpim IV dengan yang berjumlah 17 (delapan belas) orang atau 73,91%.

Tabel 2.4
ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Diklatpim I	0	0,00
2	Diklatpim II	1	4,35
3	Diklatpim III	5	21,74
4	Diklatpim IV	17	73,91
JUMLAH		23	100

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025

5. **Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin**

Data pada Tabel 2.5 berikut menggambarkan bahwa ASN di Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang berjenis kelamin laki – laki dan perempuan.

Tabel 2.5
ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1	Laki - Laki	89	71,78
2	Perempuan	35	28,22
JUMLAH		124	100

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025

2.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja dan capaian sasaran, dimana setiap capaian indikator kinerja dijelaskan dalam pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kinerja dan Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2024.

Dalam rangka pencapaian Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, pada Tahun 2024 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai melalui melalui 3 (tiga) program utama yang merupakan program wajib yang diproses untuk mencapai sasaran-sasaran sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Provinsi Riau Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
1	Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	27.94	28.13	103.70%	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Layanan Pelayaran	Indeks Layanan Pelayaran	53.02	53.74	100%	Sangat tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.00	70.00	100%	Sangat tinggi -
Capaian rata-rata PD					101.85%	

Sumber: LKJiP Dinas Perhubungan Tahun 202

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Provinsi Riau Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100$
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelayaran	Indeks Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelayaran			
2	Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	27.94	28.13	103.704
	Meningkatnya Layanan Pelayaran	Indeks Layanan Pelayaran	53.02	53.74	100.00

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan

Permasalahan berdasarkan Tabel dibawah dapat dilihat bahwasanya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi serta penyediaan sarana, prasarana pendukung layanan transportasi merupakan isu strategis utama Dinas Perhubungan Provinsi Riau, dimana isu strategis tersebut mencakup permasalahan – permasalahan yang tertuang dalam dokumen rancangan RPJMD Provinsi Riau 2025-2029, diantaranya **“masih tinggi ketimpangan pembangunan wilayah serta belum optimalnya penyediaan dan konektivitas transportasi, ketimpangan ini terjadi karena dukungan infrastruktur belum optimal dalam membangun konektivitas antar wilayah”**. Perlunya penguatan sistem transportasi darat maupun laut yang menjadi tulang punggung konektivitas antara wilayah

Tabel 2.8
Isu Permasalahan

No	Potensi daerah	ISU.	Kriteria
1	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur	Isu Global	Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, keterbatasan investasi, dan integrasi antar moda transportasi
2		Isu Nasional	Pengembangan Wilayah
3		Isu Regional	Ketimpangan pembangunan antar wilayah

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis transpoetasi antarmoda yaitu, transportasi darat, laut dan udara yang belum terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas orang yang memenuhi aspek pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan berkeselamatan untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas orang yang memenuhi aspek pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan berkeselamatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Tahun 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Provinsi Riau harus tersinkronisasi dengan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kepala Daerah ditampilkan pada tabel ini:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Target Kinerja Pemerintah Daerah 2026

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	KET.
				2026	
1	2	3	4	6	7
Meningkatnya Layanan Transportasi	Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau		Rasio Konektivitas Transportasi	0.50	
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	0.32	
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	Rasio Konektivitas Transportasi Laut	0.69	

Sumber : Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rancangan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Bertitik tolak dari tujuan dan sasaran pencapaian rencana pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Riau tahun 2026, dimana pembangunan urusan perhubungan termasuk dalam tujuan yakni **“Memperkuat infrastruktur yang handal, guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah”** Untuk mewujudkan sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka cara–cara yang akan ditempuh atau misi pembangunan perhubungan adalah sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan ketertiban bidang Transportasi
- 2 Meningkatkan kinerja Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi.
- 3 Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi yang handal.
- 4 Mengembangkan sistem Jaringan Transportasi yang terintegrasi dalam Mewujudkan Konektifitas Antar Wilayah.
- 5 Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Bidang Perhubungan dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja.

3.1.1 Tujuan

Adapun tujuan pembangunan urusan perhubungan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah **“Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau”**

3.1.2 Sasaran

Sasaran pembangunan urusan perhubungan adalah **“Meningkatnya Konektivitas Transportasi”** dengan indikator **Rasio Konektivitas** dimana perumusan sasaran perangkat

daerah ini mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau 2026 dengan sasaran ” **Meningkatnya Konektivitas Daerah**” dan indikatornya “**Rasio Konektivitas simpul Transportasi Provinsi**”.

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA URUSAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Riau tahun 2026 yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

4.1 Rencana Program

Dalam perkembangan periode satu tahunan, upaya pembangunan dan pengembangan urusan perhubungan di Provinsi Riau, dilaksanakan melalui program sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026, program dimaksud diantaranya pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						39.310.874.857,00						10.490.649.564,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						39.310.874.857,00							10.490.649.564,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						39.310.874.857,00							10.490.649.564,00	
1,	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Bidang Perhubungan	-			100 Persen	27.871.631.617,00						-	150.000.000,00	
		[Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran]	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	27.871.631.617,00	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	-
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			12 Dokumen	268.710.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	72.350.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	119.955.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>				3 Data	76.405.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	-			130 Orang/ Bulan	23.613.436.874,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	ASN Dinas Perhubungan	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				130 Orang/ Bulan	23.613.436.874,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	ASN Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	-			1 Laporan	182.170.000,00			Melanjutka n pengemb anan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STR UKTUR	Dinas Perhubungan	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	182.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			18509 Paket	750.166.144,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				20 Paket	31.760.450,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				33 Paket	113.121.274,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				7550 Paket	148.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				8 Paket	117.278.420,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	339.206.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			68 Unit	357.790.330,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				13 Paket	31.590.330,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				26 Unit	326.200.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			47 Laporan	1.843.538.269,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR	Dinas Perhubungan	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	8.220.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	535.602.272,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.299.715.997,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-			261 Unit	855.820.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR	Dinas Perhubungan	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				27 Unit	725.230.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				167 Unit	130.590.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2,	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Rasio Konektivitas Transportasi Darat</i>	-			0,32 Rasio	8.611.676.240,00						-	8.152.531.421,00	
		[Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat]	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	0.68	0.21	0.23	0.32	8.611.676.240,00	-	-	-	-	-	-	8.152.531.421,00	-
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	<i>Jumlah Perlengkapan dan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang tersedia, terehabilitasi dan terpelihara</i>	-			774 Unit	5.764.877.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jalan	-	5.220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi														
			<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun</i>				6 Unit	962.415.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jalan		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia</i>				738 Unit	4.649.172.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jalan		4.050.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara</i>				30 Unit	153.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jalan		170.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>	-			8 Laporan	923.975.740,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jalan	-	1.205.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>				4 Laporan	477.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengine mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STR UKTUR	Pengguna Jalan		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi</i>				2 Laporan	347.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengine mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STR UKTUR	Pengguna Jalan		685.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>				2 Laporan	99.115.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jalan		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	<i>Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi</i>	-			10 Laporan	39.594.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jalan	-	120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin														
			<i>Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi</i>				10 Laporan	39.594.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jalan		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>	-			3 Laporan	422.210.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jalan	-	459.605.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>				1 Laporan	24.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jalan		49.605.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0008	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi</i>				1 Dokumen	37.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jalan		000,0075.000.	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0011	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)														
			<i>Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)</i>				2 Lokasi	360.000.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jalan		335.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	-			2 Unit	910.114.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jasa Angkutan Umum	-	1.147.926.421,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</i>				1 Laporan	77.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jasa Angkutan Umum		147.926.421,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>				2 Unit	832.894.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jasa Angkutan Umum		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>	-			1 Dokumen	550.905.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jasa Angkutan Umum	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	550.905.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jasa Angkutan Umum		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3,	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	<i>Rasio Konektivitas Transportasi Laut</i>	-			0,69 Rasio	2.777.795.000,00						-	2.090.000.000,00	
		[Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi laut]	Rasio Konektivitas Transportasi Laut	0.88	0.62	0.62	0.69	2.777.795.000,00	-	-	-	-	-	-	2.090.000.000,00	-
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	<i>Jumlah Laporan Koordniasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi</i>	-			8 Laporan	52.726.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Perusahaan Angkutan Laut	-	120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi</i>				8 Laporan	52.726.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Perusahaan Angkutan Laut		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</i>	-			3 Dokumen	1.840.384.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jasa Pelabuhan	-	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</i>				3 Dokumen	1.840.384.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jasa Pelabuhan		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	<i>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang terbangun dan terpelihara</i>	-			1 Unit	884.685.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jasa Pelabuhan	-	970.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional														
			<i>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara</i>				1 Unit	654.115.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jasa Pelabuhan		650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</i>				8 Laporan	230.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jasa Pelabuhan		320.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
4,	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perkeretaapian</i>	-			0 Dokumen	49.772.000,00						-	98.118.143,00	
		[Tersedianya Dokumen Perencanaan Perkeretaapian]	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perkeretaapian</i>	1	0	0	1	49.772.000,00	-	-	-	-	-	-	98.118.143,00	-
	2.15.05.1.07	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi</i>	-			1 Laporan	49.772.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jasa Angkutan Perkeretaapian	-	98.118.143,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi</i>				1 Laporan	49.772.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jasa Angkutan Perkeretaapian		98.118.143,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I						2.253.693.685,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.253.693.685,00							0,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						2.253.693.685,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1,	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Bidang Perhubungan	-			100 Persen	1.253.693.750,00						-	0,00	
		-	-	-	-	-	-	1.253.693.750,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			18509 Paket	420.867.633,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan	-	0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	8.366.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	103.447.306,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6384 Paket	181.272.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	13.762.327,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	114.020.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			68 Unit	126.382.366,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan	-	0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	19.018.681,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	107.363.685,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			47 Laporan	620.363.751,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan	-	0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.800.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	125.763.412,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	489.800.339,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-			261 Unit	86.080.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan	-	0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	77.110.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				13 Unit	8.970.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
2,	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	<i>Rasio Konektivitas Transportasi Laut</i>	-			0.69 Rasio	999.999.935,00						-	0,00	
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang terbangun dan terpelihara</i>	-			2 Unit	999.999.935,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jasa Pelabuhan	-	0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan</i>				1 Unit	999.999.935,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jasa Pelabuhan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I
		UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II						2.396.513.947,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.396.513.947,00							0,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						2.396.513.947,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1,	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Bidang Perhubungan	-			100 Persen	1.420.513.947,00						-	0,00	
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-			2 Paket	137.987.885,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	ASN Dinas Perhubungan	-	0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	137.987.885,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	ASN Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			18509 Paket	339.304.570,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan	-	0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	30.800.049,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				64 Paket	46.316.154,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4360 Paket	74.490.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	35.658.367,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	152.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			68 Unit	50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan	-	0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			47 Laporan	662.498.992,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan	-	0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	157.998.992,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	502.500.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	-			261 Unit	230.722.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan	-	0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	84.450.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				44 Unit	146.272.500,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Dinas Perhubungan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II
2,	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Transportasi Laut	-			0,69 Rasio	976.000.000,00						-	0,00	
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang terbangun dan terpelihara	-			2 Unit	976.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jasa Pelabuhan	-	0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan				2 Unit	976.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRA STRUKTUR	Pengguna Jasa Pelabuhan		0,00	UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II		
	J U M L A H							43.961.082.489,00								10.490.649.564,00		

Tabel 4.2
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		KETERANGAN
			2026		
			TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				46.820.780.602,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				32.495.774.602,00	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Bidang Perhubungan	100	100	32.495.774.602,00	
2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	3	150.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	6	140.000.000,00	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	3	225.000.000,00	

2.15.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	6	140.000.000,00	
2.15.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	3	225.000.000,00	
2.15.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				-	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	3	150.000.000,00	
2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		130	23.613.436.874,00	
2.15.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				-	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		130	23.613.436.874,00	
2.15.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1	191.650.000,00	

2.15.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1	191.650.000,00	
2.15.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		2	74.979.989,00	
2.15.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		2	74.979.989,00	
2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		31	203.120.157,00	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		52	74.021.044,50	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		93	228.365.686,00	

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36	960.343.000,00	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		26.000	701.700.000,00	
2.15.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		52	74.021.044,50	
2.15.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		93	228.365.686,00	
2.15.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		26.000	701.700.000,00	
2.15.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		31	203.120.157,00	
2.15.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36	960.343.000,00	
2.15.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		16	101.680.843,50	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		28	382.974.589,00	
2.15.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				-	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		16	101.680.843,50	
2.15.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		28	382.974.589,00	
2.15.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	3.506.240.827,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		8	811.610.592,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3	12.570.000,00	

2.15.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3	12.570.000,00	
2.15.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		8	811.610.592,00	
2.15.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	3.506.240.827,00	
2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		191	231.291.000,00	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		37	886.790.000,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	-	
2.15.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		37	886.790.000,00	
2.15.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		191	231.291.000,00	
2.15.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	-	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				9.185.006.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	0.21	0.32	9.185.006.000,00	
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	0	0		
2.15.02.1.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				-	
Tersedianya Dokumen Implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi			-	
	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi			-	

	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			-	
	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			-	
2.15.02.1.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				-	
Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			-	
2.15.02.1.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi				-	
Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi			-	
2.15.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi				-	
Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi			-	
2.15.02.1.01.0007 - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				-	
Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			-	
2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				-	

Tersedianya Perlengkapan dan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun		1	1.000.000.000,00	
	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia		738	5.700.000.000,00	
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara		30	170.000.000,00	
2.15.02.1.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi				-	
Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun		1	1.000.000.000,00	
2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				-	
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia		738	5.700.000.000,00	
2.15.02.1.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				-	
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara		30	170.000.000,00	
2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				-	
Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang			-	
2.15.02.1.03.0010 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				-	

Terbangunnya Terminal Tipe B yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang			-	
2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				-	
Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		4	580.000.000,00	
	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		2	120.000.000,00	
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		2	685.000.000,00	
2.15.02.1.05.0001 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				-	
Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		4	580.000.000,00	
2.15.02.1.05.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				-	
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		2	685.000.000,00	
2.15.02.1.05.0005 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				-	
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		2	120.000.000,00	

2.15.02.1.06 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi				-	
Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi			-	
	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		10	70.000.000,00	
2.15.02.1.06.0004 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				-	
Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		10	70.000.000,00	
2.15.02.1.06.0005 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin				-	
Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi			-	
2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				-	
Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		1	49.605.000,00	
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi		3	250.476.000,00	
	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		2	335.000.000,00	

	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun			-	
	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan			-	
	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi		7	75.000.000,00	
2.15.02.1.07.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				-	
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi		3	250.476.000,00	
2.15.02.1.07.0005 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				-	
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		1	49.605.000,00	
2.15.02.1.07.0007 - Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)				-	
Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun			-	
2.15.02.1.07.0008 - Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)				-	

Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi		7	75.000.000,00	
2.15.02.1.07.0011 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				-	
Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		2	335.000.000,00	
2.15.02.1.07.0012 - Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan				-	
Terbangunnya implementasi batas kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan			-	
2.15.02.1.08 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				-	
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			-	
	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		1	149.925.000,00	
2.15.02.1.08.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				-	

Terkendalinya dan Terawasinya KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		1	149.925.000,00	
2.15.02.1.08.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				-	
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			-	
2.15.02.1.09 - Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				-	
Tersedianya Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			-	
2.15.02.1.09.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				-	
Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			-	
2.15.02.1.10 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	

Tersedianya Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi			-	
2.15.02.1.10.0001 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi				-	
Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi			-	
2.15.02.1.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampai 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				-	
Tersedianya Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi			-	
2.15.02.1.11.0001 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi				-	
Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi			-	
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				5.040.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi laut	Rasio Konektivitas Transportasi Laut	0.62	0.69	5.040.000.000,00	
2.15.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi				-	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi		8	100.000.000,00	

2.15.03.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				-	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi		8	100.000.000,00	
2.15.03.1.08 - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				-	
Tersedianya Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		2	1.910.000.000,00	
2.15.03.1.08.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				-	
Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		2	1.910.000.000,00	
2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				-	
Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara		1	670.000.000,00	

	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia		0	-	
	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		8	360.000.000,00	
2.15.03.1.09.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional				-	
Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara		1	670.000.000,00	
2.15.03.1.09.0004 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				-	
Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		8	360.000.000,00	
2.15.03.1.09.0005 - Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional				-	
Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia		0	-	
2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				-	
Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun		0	-	
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia			-	

	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan		2	2.000.000.000,00	
2.15.03.1.10.0002 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				-	
Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun		0	-	
2.15.03.1.10.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				-	
Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan		2	2.000.000.000,00	
2.15.03.1.10.0009 - Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				-	
Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia			-	
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				100.000.000,00	

Tersedianya Dokumen Perencanaan Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perkeretaapian	0	0	100.000.000,00	
2.15.05.1.01 - Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian				-	
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian			-	
2.15.05.1.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian				-	
Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian			-	
2.15.05.1.07 - Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				-	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Menjadi Kewenangan Provinsi		1	100.000.000,00	
2.15.05.1.07.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Menjadi Kewenangan Provinsi				-	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi,		1	100.000.000,00	

Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi	dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi				
--	--	--	--	--	--

4.2 Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Bidang Urusan Perhubungan.

Indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam satu tahun mendatang sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RKPD 2026. Indikator kinerja tersebut tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Renja Perangkat Daerah
2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	FORMULA INDIKATOR IKU
				2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
1.	Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,42	0,50	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Renja Perangkat Daerah 2026

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	FORMULA IMDKATOR
					2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-7	(12)
1.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
2.	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	positif	Rasio	0.21	0.32	
3.	Rasio Konektivitas Transportasi Laut	positif	Rasio	0.62	0.69	

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Dokumen Renja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 ini dibuat untuk menjadi pedoman di lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam rangka penyusunan program dan kegiatan prioritas yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026. Dalam hal ketidakterediaan anggaran dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan pagu anggaran dengan menyertakan justifikasi untuk masing-masing kegiatan.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau tahun 2026 dilaksanakan mulai 1 Januari 2026 berakhir 31 Desember 2026. Dalam hal terdapat perubahan terhadap rencana kerja dimaksud baik berupa target kinerja dan lainnya akan dilakukan perubahan dalam dokumen perubahan rencana kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau 2026.

5.3 Rencana tindak lanjut

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 ini kemudian dapat ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026.

Demikian Dokumen Rencana Kerja ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagai pedoman penyusunan program kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Riau tahun 2026.

Pekanbaru, Oktober 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI RIAU**



ANDI YANTO, SH, MH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19740728 200212 1 002

**LAMPIRAN SK TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU
Nomor : Kpts.090/DPHB-Sek 1.1 /225**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, maka setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- b. bahwa untuk meningkatkan tertib perencanaan dan kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 9);
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 67);
21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan dan menginventarisasi bahan dan data sebagai bahan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026;
 - b. Mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026;
 - c. Melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026;
 - d. Merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026;
 - e. Melaksanakan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 tepat waktu;
 - g. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
- KETIGA : Mengangkat pejabat dan nama-nama berikut untuk duduk dalam tim dengan kedudukan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 02 Februari 2025
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI RIAU**



ANDI YANTO, SH., MH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19740728 200212 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Provinsi Riau
Nomor : Kpts. 090/DPHB-sek 1.1/225
Tanggal : 02 Februari 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

NO.	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL/PELAKSANA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Wakil Ketua
3.	Kasubbag Perencanaan Program	Sekretaris
4.	Kabid Lalu Lintas Jalan	Koordinator
5.	Kabid Angkutan Jalan	Koordinator
6.	Kabid Pelayaran	Koordinator
7.	Kabid Pengembangan Transportasi	Koordinator
8.	Ka. UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Koordinator
9.	Ka. UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Koordinator
10.	Analisis Kebijakan Muda	Koordinator
11.	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Anggota
12.	Kasubbag Keuangan, Perlengkapan & Pengelola BMD	Anggota
14.	Penelaah Teknis Kebijakan/Pelaksana	Anggota

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI RIAU**



ANDI YANTO, SH., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19740728 200212 1 002

FORM VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR
RENJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2026

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1.	BAB I	PENDAHULUAN			
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	☒	-	
	1.2 Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	☒		
	1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.	☒		
	1.4 Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.		☒	Untuk Sistematika agar di uraikan dan digambarkan Pokok Bahasan secara garis besar sebagai Contoh : - Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD - Dasar Hukum :

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
					Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah - Maksud dan Tujuan : Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah - Dst...
2.	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024			
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan 7. Sajikan Tabel T-C.29	☒		
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	1. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun		☒	Judul Sub Bab 2.2 agar disesuaikan menjad “Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah” dengan uraian/ isinya antara lain :

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
	Perangkat Daerah	terhadap IKK; 2. Sajikan Tabel T-C.30			○ Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK; ○ Sajikan Tabel T-C.30
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan		☒	Sub Bab 2.3 diagar disesuaikan menjadi : “Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah” dengan uraian berisi : ○ Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; ○ Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; ○ Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>); ○ Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan ○ Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
	2.4 Review terhadap RKPD	Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat didalam RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan 4. Sajikan Tabel T-C.31		☒	Sub Bab 2.4 disesuaikan menjadi “Review terhadap RKPD” yan berisi : ○ Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; ○ Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; ○ Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat didalam RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan ○ Sajikan Tabel T-C.31

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	Berisikan uraian mengenai : 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel T-C.32		☒	Sub Bab 2.5 disesuaikan menjadi “Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat” yang berisi antara Lain : - o Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; - o Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; - o Sajikan Tabel T-C.32
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Berisikan uraian mengenai : Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		☒	
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah; 2. Target Indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada Renja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.		☒	
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Berisikan uraian mengenai : 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan; 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan; 3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif,		☒	

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
		maupun kombinasi keduanya dan 4. Sajikan Tabel T-C.33			
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH			Judul Bab IV agar di sesuaikan menjadi : “Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah”
		Berisikan uraian mengenai : Hasil inputan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada SIPD RI sesuaikan target indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan RKPD		☒	Hasil inputan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada SIPD RI sesuaikan target indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan RKPD
5	BAB V	PENUTUP			
		Berisikan uraian mengenai : 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; 3. Rencana tindak lanjut; 4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah , serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.		☒	Pada bagian lembar terakhir di tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
6	LAMPIRAN	1. Format pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan renstra perangkat daerah tahun 2025-2026 dengan program/kegiatan/sub kegiatan SIPD-RI (Renja 2026) 2. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026		☒	Agar dilampirkan : - o Format pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan renstra perangkat daerah tahun 2025-2026 dengan program/kegiatan/sub kegiatan SIPD-RI (Renja 2026) - o SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026

An. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau
Sekretaris,

LA ODE ASFAR, S.STP.,M.Si
Nip. 19840202 200212 1 002

Pekanbaru, 2025

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan,

PAIDI. S.Hut.,MT
Nip. 19720518 1998703 1 006

Kasubbag Perencanaan Program,

AKMAL S.E.,M.Si
Nip. 19741217 200012 1 001

Verifikator :

1. **DEDI HARIANTO. ST**
Nip. 19741105 200701 1 005
Fungsional Perencana Ahli Muda

2. **ALVIANDRA FITRYAN, S.Tr.IP**
Nip. 19990407 202108 1 001
Penelaah Teknis Kebijakan

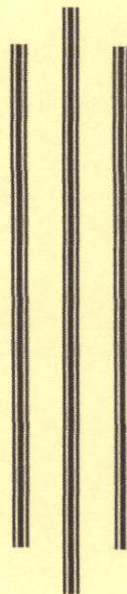


PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENJA-PD
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2026



NOMOR : 419/LHR/INSP-RIAU/ir.IV/XII/2025

TANGGAL : 01 DESEMBER 2025



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
Email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

Nomor : 419/LHR/INSP-RIAU/Ir.IV/XII/2025 Pekanbaru, 01 Desember 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas
Rancangan Akhir Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas
Perhubungan Provinsi Riau Tahun
2026

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau
di - Pekanbaru

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan, kami telah melakukan reviu terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut:

I. Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 berupa pengujian terbatas terhadap substansi dan penyajian dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 **belum sepenuhnya** didukung dengan dokumen pendukung yang memadai.
2. Penyajian sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 **belum sepenuhnya** mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau Nomor 000.7/136/BAPPEDA-BIDANG I/2025 tanggal 29 Oktober 2025.
3. Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 pada BAB III **belum sepenuhnya** selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran pada BAB IV Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026.
4. Penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 **telah selaras** dan didasari atas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

5. Penetapan indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 **telah selaras** dan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026.
6. Penyajian rumusan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 **belum selaras** dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.
7. Penyajian rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 **belum selaras** dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.
8. Penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 **belum selaras** dengan pagu RKPD Tahun 2026.
9. Penyajian indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 **belum sepenuhnya** mempedomani indikator target pada Renstra-PD.

II. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 3743/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025;
8. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 370/SPT/2025 tanggal 03 November 2025.

III. Tujuan Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau ini bertujuan untuk:

1. Memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan saran perbaikan atas kelemahan dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Kelengkapan dokumen pendukung penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
2. Kesesuaian sistematika penulisan dan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
3. Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan RKPD;
4. Penyusunan substansi antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) meliputi :
 - a. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Bab III Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
 - b. Indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
 - c. Keselarasan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan antara Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
 - d. Keselarasan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
 - e. Keselarasan pagu Renstra-PD, RKPD dengan pagu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD); dan
 - f. Keselarasan indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra-PD dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

V. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penelaahan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
2. Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk tatap muka maupun menggunakan media komunikasi.
3. Pengujian terbatas terhadap kesesuaian, konsistensi, dan integrasi perencanaan pembangunan, dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan dokumen.
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak terkait sebelum finalisasi Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Catatan Hasil Reviu (CHR).

VI. Gambaran Umum

Dinas Perhubungan Provinsi Riau sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.

Adapun hal yang mendasari perlu dilakukannya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026, yaitu:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Perhubungan dan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2026; dan
2. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2026 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kinerja.

VII. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan atas dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelengkapan dokumen pendukung penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan bahwa penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 **belum sepenuhnya** didukung dengan dokumen pendukung yang memadai sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 01.

2. Kesesuaian sistematika penulisan dan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan bahwa penyajian sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 **belum sepenuhnya** mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau Nomor 000.7/136/BAPPEDA-BIDANG I/2025 tanggal 29 Oktober 2025 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 02.

3. Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan RKPD

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan bahwa rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 pada BAB III **belum sepenuhnya** selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran pada BAB IV Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026, dimana masih terdapat rumusan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang **belum disajikan** dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas

Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 03.

4. Penyusunan substansi antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) meliputi :

a. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Bab III Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan bahwa penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 **telah selaras** dan didasari atas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Riau sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 04.a.

b. Indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan bahwa penetapan indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 **telah selaras** dan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 04.b.

c. Keselarasan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan antara Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan bahwa penyajian rumusan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Tahun 2026 **belum selaras** dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 04.c.

d. Keselarasan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan bahwa penyajian rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 **belum selaras** dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 04.d.

e. Keselarasan pagu Renstra-PD, RKPD dengan pagu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan bahwa penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 **belum selaras** dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 04.e.

f. Keselarasan indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra-PD dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan bahwa penyajian indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 **belum sepenuhnya** mempedomani indikator target pada Renstra-PD sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 04.f.

Uraian lebih kongkrit terkait pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) di atas dapat dilihat dalam Kertas Kerja Revidi (KKR) Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

VIII. Saran

Berdasarkan hasil revidi atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026, kami memberikan saran kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau melalui Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 agar:

1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Riau untuk mendapatkan dokumen pendukung dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026;
2. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pada Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 dengan menggunakan data hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 dari Bappeda Provinsi Riau;
3. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pada rumusan tujuan dan sasaran dan rumusan indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026;
4. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 dengan mempedomani pagu yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026 dan Surat Gubernur Riau Nomor 000.7.2.4/Bappeda-Bid I/2025/4818 untuk diinput ke dalam SIPD; dan
5. Memperhatikan penyajian indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra-PD yang sesuai ketentuan.

IX. Apresiasi

Inspektorat Daerah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak, terutama Dinas Perhubungan Provinsi Riau sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan revidi

dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026.

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

 **Pt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,** 


Ir. AGUS RIANTO, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680809 199303 1 004

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Riau

dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026.

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



Ir. AGUS RIANTO, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680809 199303 1 004

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256
PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026

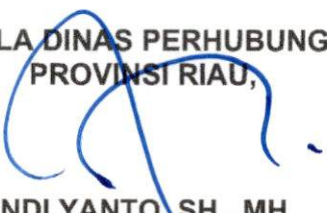


PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspktrat.riau.go.id
PEKANBARU

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU	Disusun oleh	Sapril
	Tanggal	25 November 2025
	Direviu oleh	Aulia Osna R, SH, MH
	Tanggal	25 November 2025
	Disetujui oleh	Roni Cokro S, SE, M.Si
	Tanggal	25 November 2025
CATATAN HASIL REVIU		
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026		
Uraian Catatan Hasil Reviu		No Indeks KKR
A. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)		KKR 01
Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 belum sepenuhnya didukung dengan dokumen pendukung yang memadai.		
B. Pengujian atas Kesesuaian Sistematika Penulisan dan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)		KKR 02
Penyajian sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau Nomor 000.7/136/BAPPEDA-BIDANG I/2025 tanggal 29 Oktober 2025.		
C. Pengujian Atas Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan RKPD		KKR 03
Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 pada Bab III belum sepenuhnya selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran pada Bab IV Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dimana masih terdapat rumusan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang belum disajikan dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026.		

D. Pengujian Atas Penyusunan Subtansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) meliputi :	
1. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada BAB III Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Didasarkan pada Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.a
Penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 telah selaras dan didasari atas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Riau.	
2. Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.b
Penetapan indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 telah selaras dan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026.	
3. Keselarasan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.c
Penyajian rumusan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 belum selaras RKPD Tahun 2026.	
4. Keselarasan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat dalam Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.d
Penyajian rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.	
5. Keselarasan Pagu Renstra-PD, RKPD 2026 dengan Pagu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.e
Penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 belum diselaraskan dengan pagu RKPD Tahun 2026.	
6. Keselarasan Indikator Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renstra-PD dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.f
Penyajian indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 belum sepenuhnya mempedomani indikator target yang semestinya.	

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN	
SARAN	
Berdasarkan hasil revidi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026, kami memberikan saran kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau melalui Tim Penyusun Rancangan Akhir Renja-PD Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 agar :	
1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Riau untuk mendapatkan dokumen pendukung dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026. 2. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pada Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 dengan menggunakan data hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 dari Bappeda Provinsi Riau. 3. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pada rumusan tujuan dan sasaran dan rumusan indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026. 4. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2026 dengan mempedomani pagu yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026 dan Surat Gubernur Riau Nomor 000.7.2.4/Bappeda-Bid I/2025/4818 untuk diinput ke dalam SIPD. 5. Memperhatikan penyajian indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra-PD yang sesuai ketentuan.	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU,  ANDI YANTO, SH., MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19740728 200212 1 002	Pekanbaru, 25 November 2025 PENGENDALI MUTU,  Drs. ARMANSYAH Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631231 198303 1 309